



PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak itu berarti memiliki karakter yang baik dan benar

LAPORAN PEKAN SURVEI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Periode Survei 08 s.d. 25 April 2025

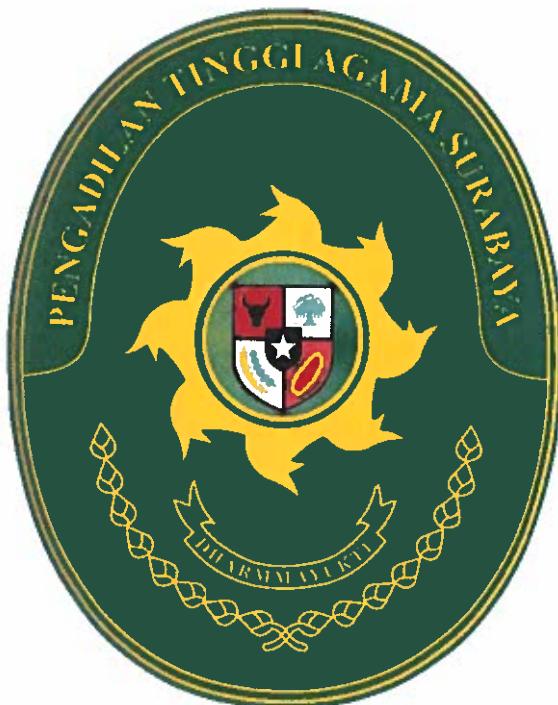


20
25

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
(Periode Survei 08 s.d. 25 April 2025)

berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
(Periode Survei 08 s.d. 25 April 2025)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
pada hari Senin, 28 April 2025



Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survei,



Benny Hardiyanto, S.H.

Ketua Tim Survei,



H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025) dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 sekaligus menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 4 April 2023 Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi. Kepuasan penerima layanan dalam hal tingkat persepsi korupsi dapat dijelaskan/ diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Demikian laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Surabaya, 28 April 2025

Ketua Tim Survei,



H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Guna mengukur tingkat persepsi korupsi dalam pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025). Pelaksanaan survei ini merupakan wujud kepatuhan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Laporan survei ini memuat hasil evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) dilakukan terhadap 76 responden yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) meliputi 5 (lima) indikator, antara lain:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,89;
- b. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,92;
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,92;
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,92;
- e. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dalam persepsi korupsi pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025), didapati nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,92 atau nilai interval konversi sebesar 98,00 yang tergolong dalam kategori mutu pelayanan A (bersih dari korupsi). Melalui hasil survei ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I KUESIONER SURVEI	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	5
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	9
A. Analisis Hasil Survei	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	18
BAB IV DATA SURVEI	21
A. Data Responden	21
B. Data dukung Lainnya	32
BAB V PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie	6
Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi.....	8
Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	9
Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	11
Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur	12
Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku.....	14
Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar.....	15
Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara.....	16
Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April Tahun 2025).....	17
Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	18
Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	22
Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	27
Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	10
Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	11
Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	12
Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku.....	14
Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	15
Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	17
Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	27
Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	31

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag.....	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag.....	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	32

BAB I KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu bentuk komitmennya berupa pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berupaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya untuk dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, serta telah terbebas dari praktik korupsi, yang diantaranya dapat dilihat dari potensi pelaksanaan suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

B. Peraturan Perundangan

- Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan perundangan, sebagai berikut;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2024;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; dan
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan dan layanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Menilai efektifnya program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
5. Membantu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengevaluasi dan menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas

institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) ini, antara lain:

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersih, akuntabel, dan transparan;
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai yang diharapkan oleh pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta anti gratifikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

F. Manfaat

Dengan tersedianya data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat:

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur/ indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; dan
4. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Unsur/ Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang memuat 5 (lima) unsur/ indikator, antara lain mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percobaan.

H. Kuesioner Survei

Kuesioner survei yang disusun untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sebagai berikut:

1. Bagian I: Identitas Responden, meliputi

- a. Nama responden;
- b. Nomor ponsel responden;
- c. Jenis kelamin;
- d. Usia;
- e. Pekerjaan;
- f. Pendidikan; dan
- g. Jenis layanan

2. Bagian II: Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk)

Pelaksanaan survei ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner *online* melalui [link https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2025](https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2025) terdiri dari 5 (lima) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan (nilai 1 – 6) yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Diberi nilai 1 (tidak sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- b. Diberi nilai 2 (tidak jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- c. Diberi nilai 3 (kurang jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan ada namun belum jelas arah alurnya sehingga prosesnya tidak efektif;
- d. Diberi nilai 4 (kurang efektif), jika pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum memuaskan sehingga prosesnya belum efektif;
- e. Diberi nilai 5 (sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit namun masih perlu diefektifkan; dan
- f. Diberi nilai 6 (sangat sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat memuaskan, sangat sederhana sehingga prosesnya mudah dan efektif.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggaran pelayanan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi kriteria survei, yaitu satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan masyarakat/ *stakeholder* yang mendapatkan manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan jenis layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:

1. Layanan pembinaan dan pengawasan;
2. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.

Kriteria responden yang diambil mencakup variasi yang cukup dari karakteristik masyarakat, seperti jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan guna memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili seluruh pengguna dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel pada pengukuran ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang meliputi aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan, permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan/ perantara.

Deskripsi kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei ini menggunakan tabel Morgan dan Krejcie sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krejcie

Tabel Morgan & Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

Sementara teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Dengan demikian, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dihitung melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses melalui alamat *link* <https://survei.badilag.net/> dengan menggunakan "nilai rata-rata" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana rumus berikut:

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{\text{Jumlah responden} \times 30} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Percentase SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{4} \times 100\%$$

2. Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala Likert dengan penilaian antara 1 – 6, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi terendah (tidak sesuai), sementara nilai 6 merupakan skor persepsi tertinggi (sangat sesuai) dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani (semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan).

Metode analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas pertanyaan survei.

Adapun nilai interval persepsi kualitas pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

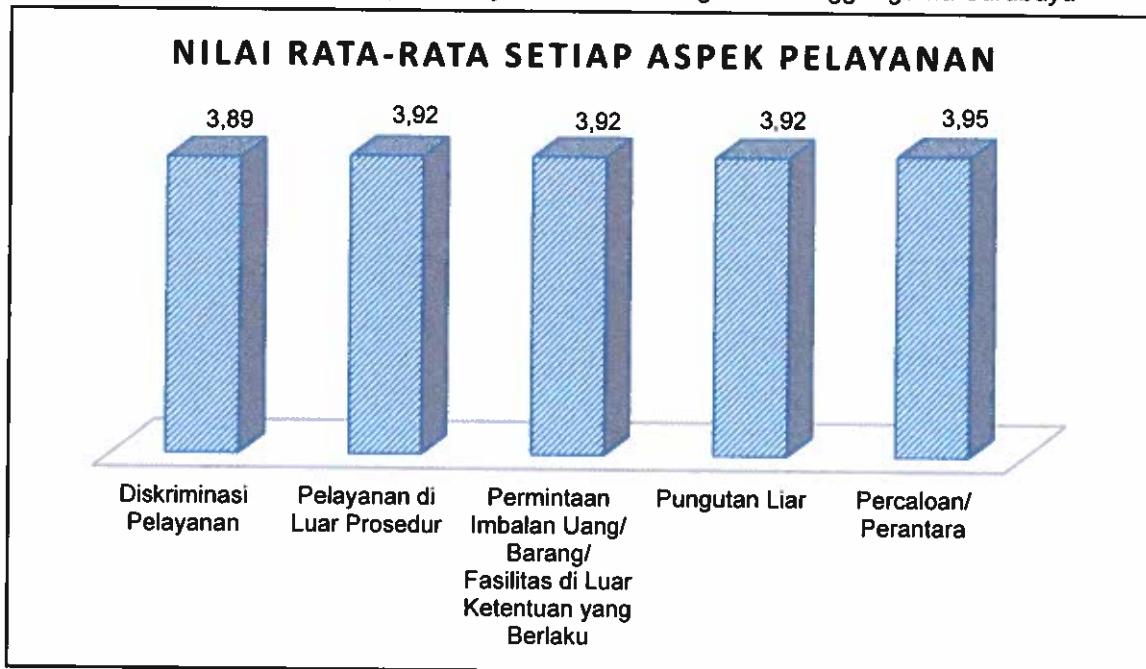
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 76 responden. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,92 dengan nilai konversi sebesar 98,00 dan berada pada kategori “**SANGAT BAIK**”. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variabel penilaian. Adapun nilai rata-rata setiap aspek pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,89	Bersih dari Korupsi (A)	5
U2	Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,92	Bersih dari Korupsi (A)	2
U3	Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3,92	Bersih dari Korupsi (A)	3
U4	Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,92	Bersih dari Korupsi (A)	4
U5	Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,95	Bersih dari Korupsi (A)	1
Rata-rata Tertimbang		3,92	Sangat Baik (A)	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur pelayanan, terdapat unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan sangat baik, yaitu percaloan/ perantara. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan paling rendah, yaitu diskriminasi pelayanan. Di bawah ini merupakan analisis data hasil masing-masing aspek pelayanan dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori "Bersih dari Korupsi".

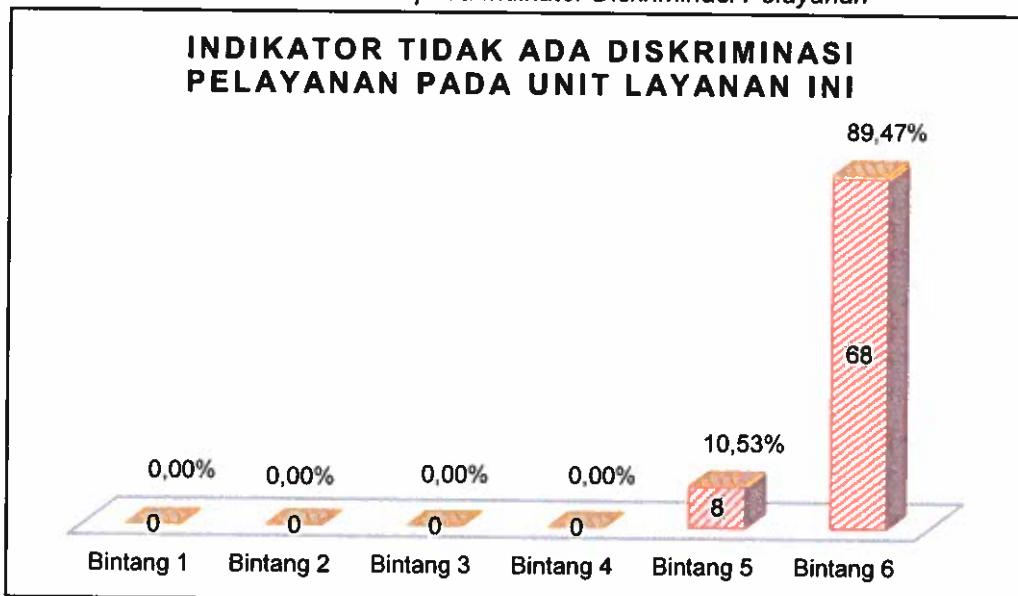
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Bintang	Jumlah	Percentase
★	0	0,00%
★★	0	0,00%
★★★	0	0,00%
★★★★	0	0,00%
★★★★★	8	10,53%
★★★★★★	68	89,47%
Jumlah	76	100,00%
Indeks		3,89

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,89. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 68 responden (89,47%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa petugas layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Selain itu, sejumlah 8 responden (10,53%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/ prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan menunjukkan hasil pada indeks 3,92. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori "Bersih dari Korupsi".

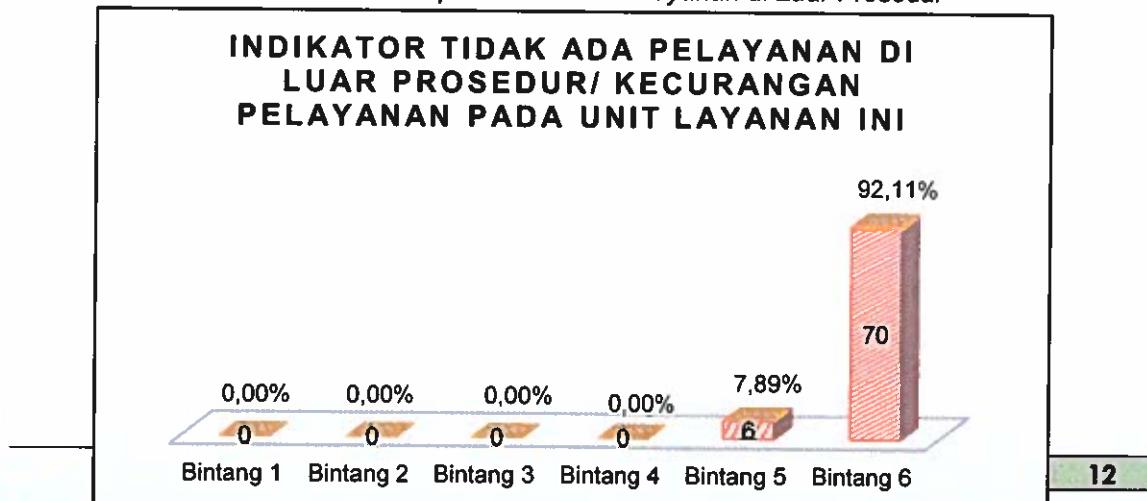
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★★	0	0,00%
★★★	0	0,00%
★★★★	0	0,00%
★★★★★	6	7,89%
★★★★★★	70	92,11%
Jumlah	76	100,00%
Indeks		3,92

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,92. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 70 responden (92,11%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sejumlah 6 responden (7,89%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak adanya kecurangan pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/ jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) di luar ketentuan. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori "Bersih dari Korupsi".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★★	0	0,00%
★★★	0	0,00%
★★★★	0	0,00%
★★★★★	6	7,89%
★★★★★★	70	92,11%
Jumlah	76	100,00%
Indeks		3,92

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini berada pada angka 3,92. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 70 responden (92,11%) memberikan skor bintang 6 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 6 responden (7,89%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak ada

imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih perlu ditingkat lagi.

4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli) bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori "Bersih dari Korupsi".

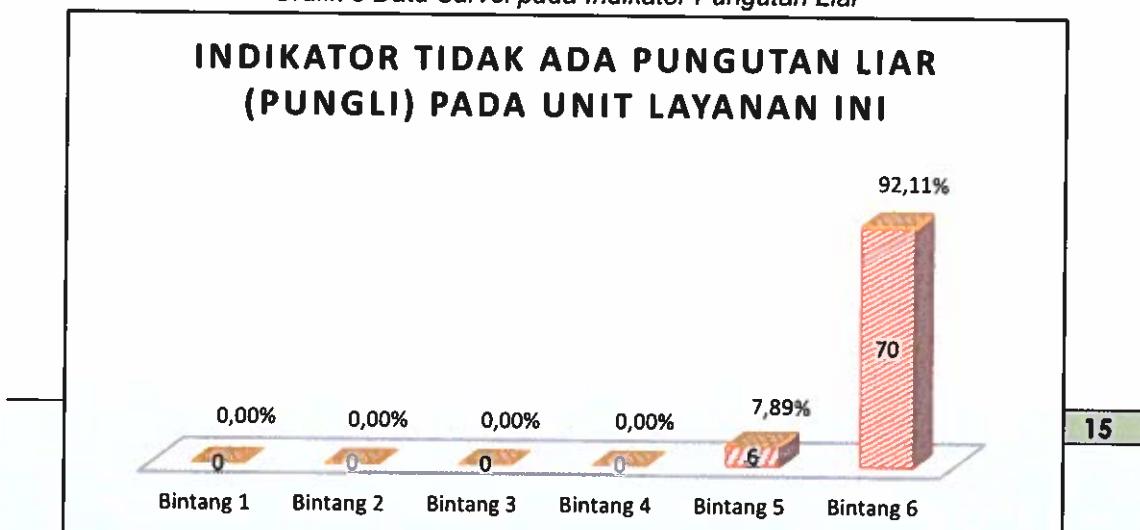
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar

Jumlah Bintang	Jumlah	Percentase
★	0	0,00%
★★	0	0,00%
★★★	0	0,00%
★★★★	0	0,00%
★★★★★	6	7,89%
★★★★★★	70	92,11%
Jumlah	76	100,00%
Indeks		3,92

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,92. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 70 responden (92,11%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 6 responden (7,89%) memberikan skor bintang 5 yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden belum sepenuhnya setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Informasi ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan yang dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

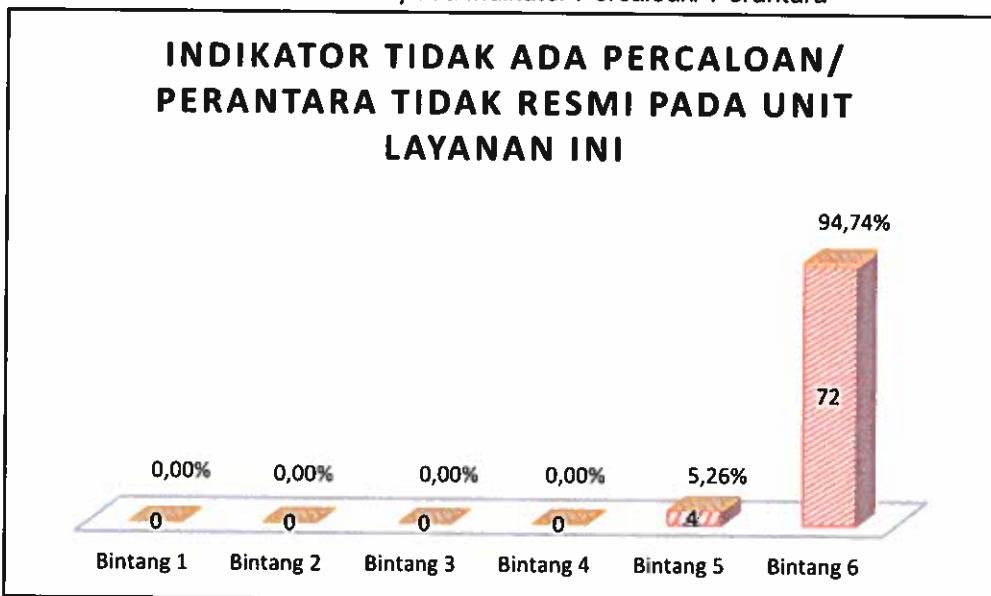
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tarif/ biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/ biaya yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	1	1,16%
★★	0	0,00%
★★★	0	0,00%
★★★★	0	0,00%
★★★★★	4	5,26%
★★★★★★	72	94,74%
Jumlah	76	100,00%
Indeks		3,95

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,95. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 72 responden (94,74%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu, sejumlah 4 responden (5,26%) memberikan skor bintang 5 yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April Tahun 2025)

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai SPAK	3,92 dengan nilai konversi 98,00
2	Kategori	Bersih dari Korupsi
3	Unsur Terendah	U1: Diskriminasi Pelayanan
4	Unsur Tertinggi	U5: Percaloan/ Perantara
5	Prioritas Perbaikan	U1: Diskriminasi Pelayanan

Guna memotivasi dan memperbaiki kinerja pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka masukan/ opini/ pandangan masyarakat/ stakeholder sangat diperlukan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat/ stakeholder. Masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar tetap mempertahankan pelayanan prima yang mudah, cepat, dan biaya ringan, serta terus membuat inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara
2	Pertahankan pelayanan yang sudah sangat baik
3	Sudah sangat baik, mohon dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
4	Petugas memberikan pelayanan dengan sangat baik, informatif dan komunikatif
5	Tingkatkan pelayanan untuk masyarakat lebih sempurna
6	Supaya ada progres dan inovasi yang lebih baik untuk memudahkan dalam pelayanan
7	Kualitas pelayanan yang sangat baik ini pertahankan dan tingkatkan dengan inovasi
8	Sudah bagus, harap dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi
9	Sangat bagus pelayanan, semoga bisa semakin ditingkatkan dengan inovasi inovasi terbaru
10	Pelayanan telah sangat baik

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025) didapatkan hasil survei sebesar 98,00 dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,92 yang termasuk dalam kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**". Dari 5 (lima) unsur/ indikator, terdapat nilai unsur tertinggi, yaitu pada unsur percaloan/ perantara dengan nilai 3,95 sementara unsur diskriminasi pelayanan memperoleh nilai unsur terendah, yaitu sebesar 3,89.

Meskipun sebagian besar responden memberikan skor dan rata-rata yang tinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), namun terdapat beberapa catatan analisis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan layanan agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin optimal dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat terus meningkat.

Tindak lanjut tersebut juga diperlukan guna mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang salah satu arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), antara lain:

1. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kemampuan bagi petugas PTSP sebagai pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan akuntabel berdasarkan SOP; dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap layanan yang diberikan dilakukan secara profesional dan tidak ada diskriminasi atau kecurangan.

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu		PIC
			Mei	Juni	
1	U1: Diskriminasi Pelayanan	a. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; b. Meningkatkan kemampuan bagi petugas PTSP sebagai pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan akuntabel berdasarkan SOP; dan c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap layanan yang diberikan dilakukan	✓	✓	Top Management

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu		PIC
			Mei	Juni	
		secara profesional dan tidak ada diskriminasi atau kecurangan.			

Setelah melakukan tindak lanjut, pihak unit layanan harus memantau dan mengevaluasi kembali kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil survei harus melibatkan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Responden ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025) diikuti oleh 76 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun data dari para responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025), sebagai berikut:

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag

The screenshot shows the Survelag application interface. At the top, there's a blue header bar with the title 'survelag.ditjenbadilag.go.id'. Below it, a navigation bar includes 'Dashboard', 'Survei', 'Identitas', 'Data Responden', 'Form Kajian', and 'Cita & Saran'. The main content area is titled 'Identitas Responden' and contains fields for 'Nama Responden', 'NIK (Nomor Identitas)', 'Email', 'Pekerjaan', and 'Pilih pekerjaan'. There's also a placeholder text 'Kami menghormati kerahasiaan data pribadi anda.' and a checkbox for accepting terms and conditions. At the bottom, there are two buttons: '< Kembali' and 'Selanjutnya >'.

Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
1	Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M.	08*****0051	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
2	Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.	08*****0018	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan penyelesaian perkara
3	Laili Hidayati, A.Md., S.H.	08*****9104	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Lainnya	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
4	Farhan Hidayat, S.H.I.	08*****9235	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Lainnya	Layanan penyelesaian perkara
5	Syamsudil Dluha, S.Kom., M.H.I.	08*****7001	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
6	Purnama Kurniawan, S.H.	08*****1234	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
7	Puspita Nur Astuti, S.E., M.H.	08*****2690	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
8	Aris Dwi Sutiyono, S.T.	08*****6268	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
9	Durorin Humairo, S.H.	08*****1537	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
10	Vanny Indya Hartiningrum	08*****7323	SMP (Sederajat)	Wanita	Buruh harian lepas	Layanan penyelesaian perkara
11	Muji Risminasari	08*****9141	SMP (Sederajat)	Wanita	Buruh harian lepas	Layanan penyelesaian perkara
12	Suyitno, S.H., M.H.	08*****7976	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
13	Misbah, S.H., M.H.	08*****7665	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
14	Miftahul Huda, S.Ag, M.H.	08*****4044	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
15	Yunitista Fauziyah, S.H.I., M.H.	08*****0491	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
16	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	08*****4177	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
17	Yeti Rianawati, S.H., M.H.	08*****0543	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pengawasan dan pembinaan
18	Yovana Riken Keiky, S.IAN.	08*****5955	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pengawasan dan pembinaan
19	Novan Yahya Utama, S.Kom.	08*****7946	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
20	Nurlailia Isnawati, S.Akun.	09*****6016	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
21	Arif Rachman, S.H.	08*****3130	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
22	Rini Wulandari, S.H., M.H.	08*****5541	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
23	Anggi Mariatu Sholikhhat	08*****9864	Strata-3 (S3)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
24	Mashuri, S.Ag.	08*****0707	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
25	Murtadha Muttaahhari, S.H.	08*****8985	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
26	Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.	08*****2900	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
27	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pengawasan dan pembinaan
28	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
29	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
30	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
31	Ivana Rantansari, S.A.P	08*****9196	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
32	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	08*****7886	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
33	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	08*****7886	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
34	Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H.	08*****2751	Strata-3 (S3)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
35	Buyung Tumanggor, S.Kom.	08*****9833	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
36	Junaidi Syampurno, S.H.	08*****2247	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
37	Sugianto, S.H.	08*****8488	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
38	Irawan Mahardika, S.Kom., M.H.	08*****9680	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
39	Aliqotul Maula Alfarrahah, S.Ag., M.H.	08*****9250	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
40	Tatang Winarto, S.Kom.	08*****6252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
41	Tatang Winarto, S.Kom.	08*****6252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
42	Tatang Winarto, S.Kom.	08*****6252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
43	Tatang Winarto, S.Kom.	08*****6252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
44	Rusdi Isnan Yulkhamsyah, S.H.I., M.H.	08*****6715	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
45	Rachmad Firmans Kristanto, S.Mn.	08*****1937	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
46	Muzaki, S.H., M.H.	08*****5367	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
47	Khusnul Aini, S.H., M.H.	08*****5582	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
48	Ila Pujiastuti, S.H.I.	08*****2992	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
49	Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.	08*****7778	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
50	Ery Handini, S.H., M.H.	08*****4682	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pengadilan
51	Mochammad Arifin Jatmiko Wijayarso	08*****5689	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
52	Nasaritha Randhitia Permata, S.H., M.H.	08*****8501	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
53	Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.	08*****7671	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
54	Nur Laela Kusna, S.Ag., M.H.	08*****2055	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
55	Sihabudin, S.H.I.	0*****2843	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian produk pengadilan
56	Widodo Suparijanto, S.H.I., M.H.	0*****4855	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
57	St. Mar'atu Ulfah, S.Ag.	*****7555	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
58	H. Mahrus, Lc., M.H.	08*****5458	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pengawasan
59	Ratna Bumulo, S.Ag.	08*****1499	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
60	M. Ali Mahfud, S.H.I.	08*****7924	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
61	Ridho Firmansyah, S.H., M.H.	08*****0028	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
62	Tedy Agastyia Dwi Permana, S.Kom.	08*****3213	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
63	Moh. Lutfi Amin, S.H.I.	08*****6022	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
64	Sukariyah	08*****2068	SMA/ SMK Sederajat	Wanita	Petani/ pekebun	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
65	Ahmad Muhammad Nuruzzaman Affi, S.E.	08*****4678	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
66	H. Hendra Agus Junaidi, S. H, M. H.	08*****1711	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
67	Tri Anita Budi Utama, S.H.	08*****9450	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
68	Drs. Sutipno	08*****5977	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
69	Merinta Prameswari, S.A.	08*****2331	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
70	Dewi Khusna	08*****8274	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
71	Ahmad Atas Muhrif, S.H.I.	08*****2222	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
72	H. Mihdar, S.Ag., M.H.	08*****2314	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
73	Amir Hamzah, S.H.	08*****4909	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
74	Riky Yohana, S.E., M.H.	08*****0637	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
75	Lilik Insiyati, S.Ag.	08*****7582	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
76	Radik Kriolampah, S.Kom.	08*****3352	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

1. Jenis Layanan

Pada periode Pekan Survei (08 s.d 25 April 2025) ini, sebagian besar responden adalah responden yang menggunakan layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan sebesar 24 orang (31,58%), layanan pembinaan dan pengawasan sejumlah 23 orang (30,26%), disusul dengan layanan penyelesaian perkara sejumlah 21 orang (27,63%), dan layanan penyerahan produk pengadilan sejumlah 8 orang (10,53%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Percentase
1	Layanan pembinaan dan pengawasan	23 orang	30,26%
2	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	24 orang	31,58%
3	Layanan penyelesaian perkara	21 orang	27,63%
4	Layanan penyerahan produk pengadilan	8 orang	10,53%
Jumlah		76 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

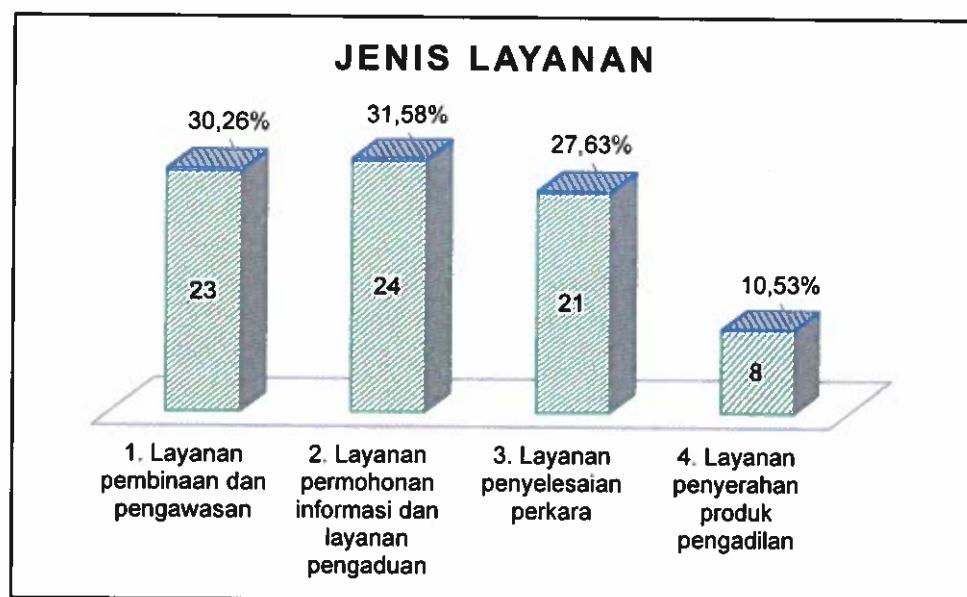
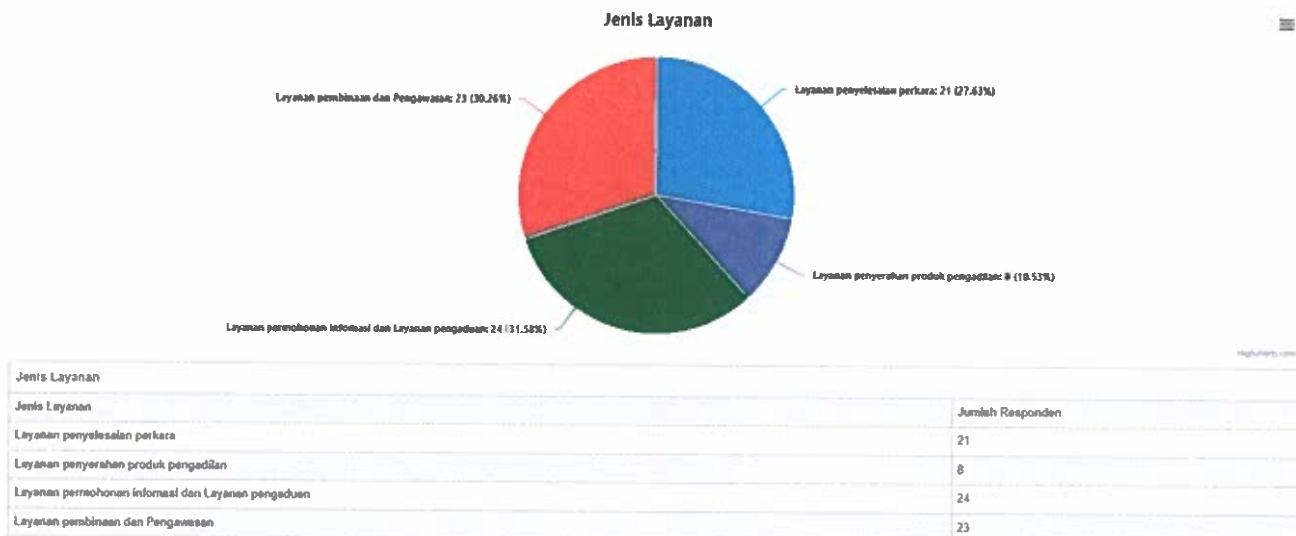


Diagram 1 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan



2. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 54 orang (72,37%) dan sisanya perempuan sejumlah 21 orang (27,63%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	54 orang	72,37%
2	Perempuan	21 orang	27,63%
Jumlah		76 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

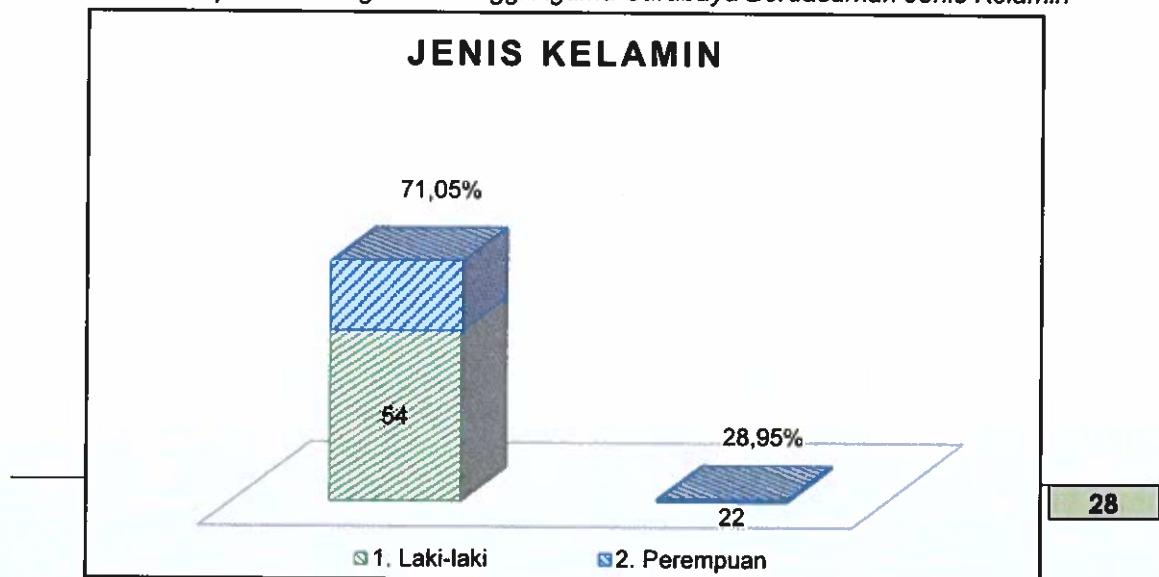
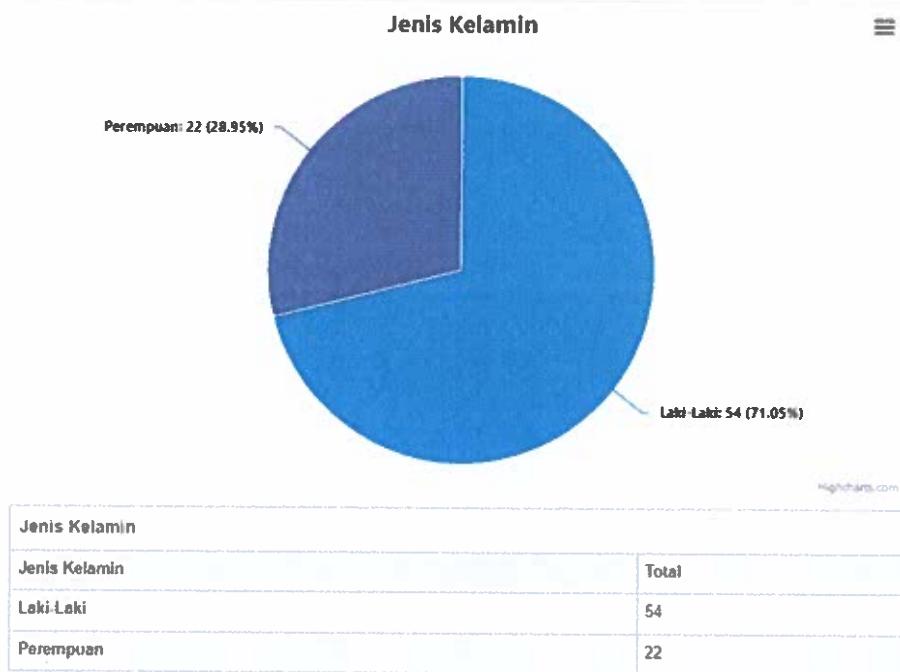


Diagram 2 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin



3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berpendidikan Diploma IV/ Strata-1 (S1), yaitu sejumlah 40 orang (52,63%). Disusul dengan responden Strata-2 (S2) sejumlah 31 orang (40,79%), Strata-3 (S3) dan SMA/ SMK sederajat masing-masing sejumlah 2 orang (2,63%), serta Akademi/ Diploma sejumlah 1 orang (1,32%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Strata-3 (S3)	2 orang	2,63%
2	Strata-2 (S2)	31 orang	40,79%
3	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	40 orang	52,63%
4	Akademi/ Diploma	1 orang	1,32%
5	SMA/ SMK Sederajat	2 orang	2,63%
Jumlah		76 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

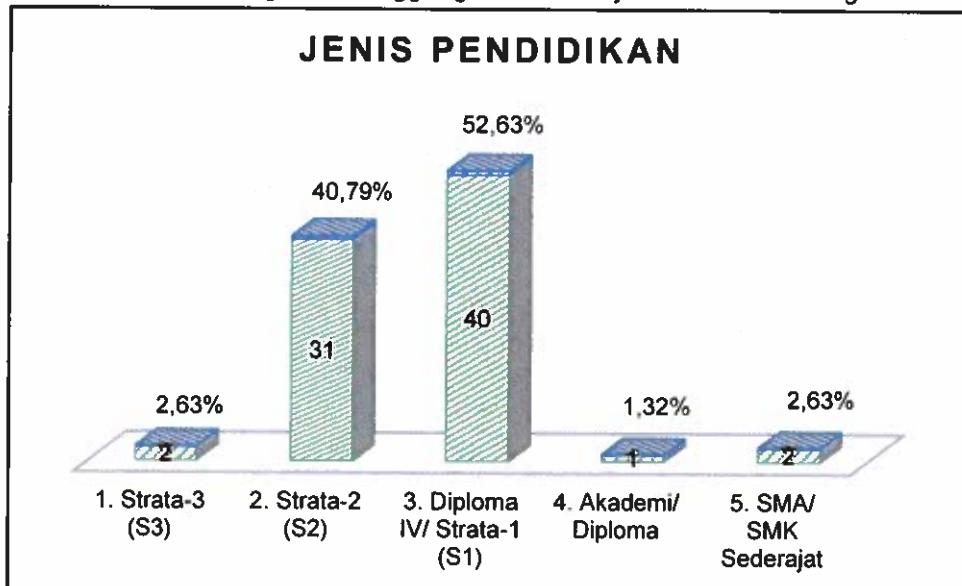
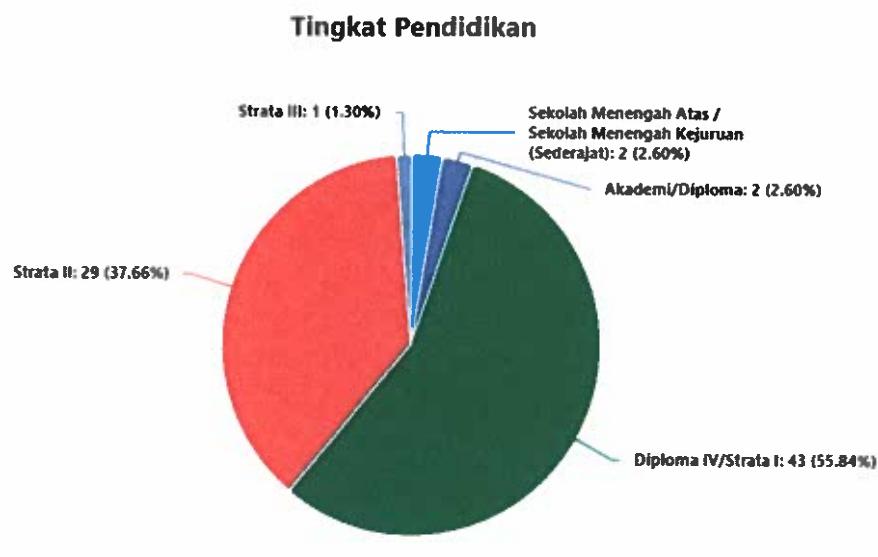


Diagram 3 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tingkat Pendidikan		Total
Tingkat Pendidikan		Total
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)		2
Akademi/Diploma		2
Diploma IV/Strata I		43
Strata II		29
Strata III		1

4. Pekerjaan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 68 orang (89,47%), lainnya sejumlah 5 orang (6,58%), buruh harian lepas sejumlah 2 orang (2,63%), dan sisanya berprofesi sebagai petani/ pekebun sejumlah 1 orang (1,32%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	68 orang	89,47%
2	Petani/ pekebun	1 orang	1,32%
3	Buruh harian lepas	2 orang	2,63%
4	Lainnya	5 orang	6,58%
Jumlah		76 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

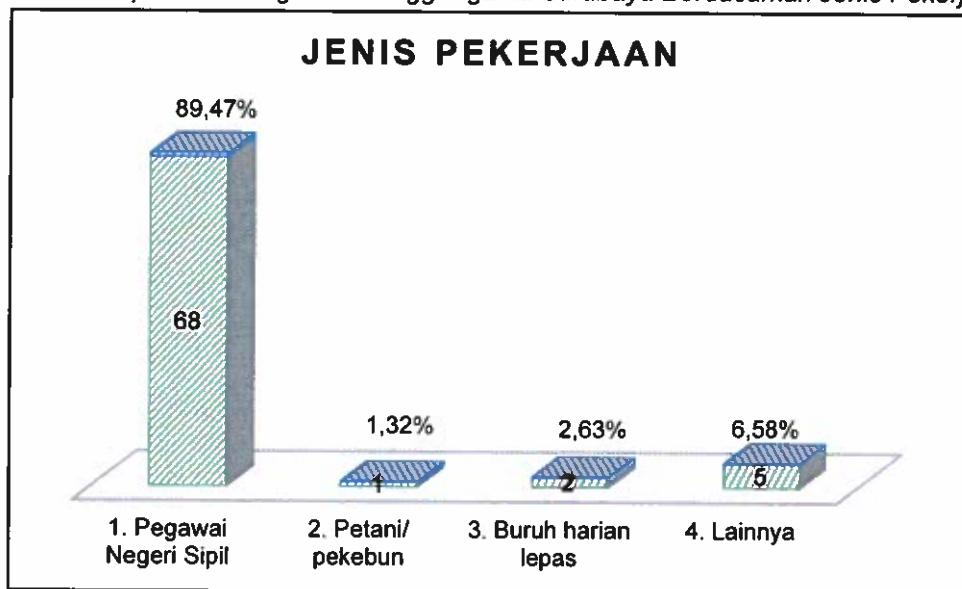
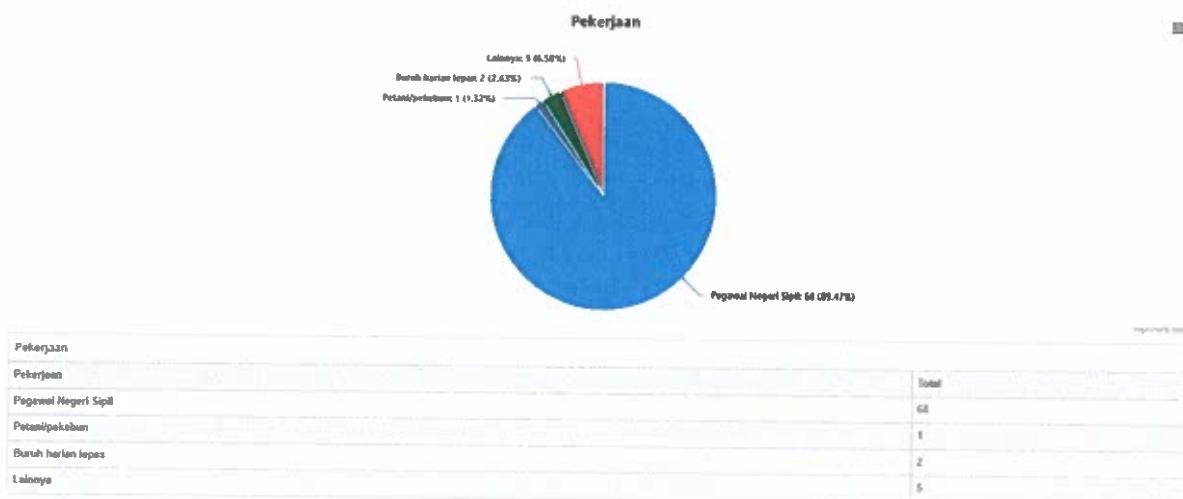


Diagram 4 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan



B. Data dukung Lainnya

Berikut ini dilampirkan data dukung lainnya berupa tangkapan layar pada aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk)

DATA UNSURSURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode Tanggal 08 April 2025 s.d 25 April 2025
 Total Responden : 76 INDEKS : 3.92

Copy CSV Excel Print

NO	A	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini		3.89	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini		3.92	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini		3.92	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini		3.92	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini		3.95	Sangat Baik (A)

STATISTIK SURVEI
 Periode Tanggal 08 April 2025 s.d 28 April 2025

76
Data Responden

3.86
Indeks Kepuasan Masyarakat

3.87
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

3.92
Indeks Persepsi Anti Korupsi

Data Detail Hasil Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
1	6	6	6	6	6	4
2	6	6	6	6	6	4
3	6	6	6	6	6	4
4	6	6	6	6	6	4
5	6	6	6	6	6	4
6	6	6	6	6	6	4
7	6	6	6	6	6	4
8	6	6	6	6	6	4
9	6	6	6	6	6	4
10	6	6	6	6	6	4
11	6	6	6	6	6	4
12	5	5	5	5	5	3
13	6	6	6	6	6	4
14	6	6	6	6	6	4
15	6	6	6	6	6	4
16	6	6	6	6	6	4
17	6	6	6	6	6	4
18	6	6	6	6	6	4
19	6	6	6	6	6	4
20	6	6	6	6	6	4
21	5	5	5	5	6	3,20
22	5	5	5	5	5	3
23	6	6	6	6	6	4
24	6	6	6	6	6	4
25	6	6	6	6	6	4
26	6	6	6	6	6	4
27	5	6	6	6	6	4
28	5	6	6	6	6	4
29	6	6	6	6	6	4
30	6	6	6	6	6	4
31	6	6	6	6	6	4
32	6	6	6	6	6	4
33	6	6	6	6	6	4
34	6	6	6	6	6	4
35	6	6	6	6	6	4
36	6	6	6	6	6	4
37	6	6	6	6	6	4
38	6	6	6	6	6	4
39	6	6	6	6	6	4
40	6	6	6	6	6	4
41	6	6	6	6	6	4
42	6	6	6	6	6	4
43	6	6	6	6	6	4
44	6	6	6	6	6	4
45	6	6	6	6	6	4
46	5	5	5	5	5	3
47	5	5	5	5	6	3,20

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
48	6	6	6	6	6	4
49	6	6	6	6	6	4
50	6	6	6	6	6	4
51	6	6	6	6	6	4
52	6	6	6	6	6	4
53	6	6	6	6	6	4
54	6	6	6	6	6	4
55	6	6	6	6	6	4
56	6	6	6	6	6	4
57	6	6	6	6	6	4
58	6	6	6	6	6	4
59	6	6	6	6	6	4
60	6	6	6	6	6	4
61	6	6	6	6	6	4
62	5	5	5	5	5	3
63	6	6	6	6	6	4
64	6	6	6	6	6	4
65	6	6	6	6	6	4
66	6	6	6	6	6	4
67	6	6	6	6	6	4
68	6	6	6	6	6	4
69	6	6	6	6	6	4
70	6	6	6	6	6	4
71	6	6	6	6	6	4
72	6	6	6	6	6	4
73	6	6	6	6	6	4
74	6	6	6	6	6	4
75	6	6	6	6	6	4
76	6	6	6	6	6	4
Total	448	450	450	450	452	-
Jumlah Kuesioner	76	76	76	76	76	-
Rata - rata	3,89	3,92	3,92	3,92	3,95	-
Rata-rata x Bobot	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	-
						3,92
						98,00

Kesimpulan:

Nilai IPAK setelah dikonversi : 98,00

Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih Dari Korupsi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan 76 responden yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki indeks persepsi anti korupsi, yaitu 3,92 atau 98,00 dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut terdiri dari 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,89;
2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,92;
3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,92;
4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,92;
5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,95.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada periode Pekan Survei (08 s.d. 25 April 2025) di atas menunjukkan bahwa mayoritas memiliki indeks di atas 3,95 atau masuk pada mutu "**BERSIH DARI KORUPSI**". Namun, dari 5 (lima) unsur/ indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan indeks terendah, yaitu indikator diskriminasi pelayanan. Terhadap indikator dengan nilai tertinggi agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara terhadap indikator dengan nilai terendah agar tetap dipantau dan lebih ditingkatkan lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
2. Surat Permohonan Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 1568/KPTA.W13-A/PS1.7/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dalam rangka peningkatan pelayanan mutu dan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA), maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menunjuk kembali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA);
- d. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Megara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)**
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 1720/KPTA.W13-A/PS.1.7/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEDUA : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 19600212 198703 2 002

Tembusan Yth.:

1. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Plh. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; dan
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.



Lampiran I : Surat Keputusan
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
 Nomor : 1568/KPTA.W13-A/PS1.7/I/2025
 Tanggal : 17 Juni 2024

**PENUNJUKAN TIMSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),
 SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN
 SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2	Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Pengarah
4	Dr. Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
5	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua Tim
6	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.	Perencana Pertama	Penyusun Laporan
8	Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.	Perencana Muda	
9	Ihdina Sabilal Haq, S.E.I.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Surveyor
10	Eka Siti Khomariyah, S.E.	Perencana Pertama	
11	Kartika Citraning Karwendyanto, S.Pd	Petugas PTSP	
12	Novera Intan Hapsari Suwarno Putri,. S.Sos.	Petugas PTSP	



Lampiran II : Surat Keputusan
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
 Nomor : 1568/KPTA.W13-A/PS1.7/I/2025
 Tanggal : 17 Juni 2024

JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3.	Pengarah	a. Menyusun Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) dan jadwal survei; b. Menyiapkan materi <i>briefing</i> terhadap persiapan hingga pelaporan hasil survei.
4.	Ketua Tim	a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei; b. Memimpin tahapan pelaksanaan survei mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian/ pelaporan hasil survei; c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei; d. Menentukan responden; e. Melaporkan hasil kegiatan survei kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Tim b. Menyiapkan dan mengirimkan surat terkait pelaksanaan survei; c. Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan survei.
6.	Penyusun Laporan	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;



NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
		Melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei.
7.	<i>Surveyor</i>	Menganalisis dan mengolah hasil survei.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 1498/KPTA.W13-A/OT1.6/IV/2025
Sifat : Penting
Hal : Permintaan Pengisian Pekan Survei
Tahun 2025

Surabaya, 08 April 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Nomor: 692/DJA/OT1.6/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penyampaian Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025 sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meminta kepada seluruh satuan kerja se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) pada aplikasi Survelag yang dapat diakses melalui alamat link <https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2025>;
2. Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) terdiri dari 5 (lima) orang responden yang pernah menggunakan layanan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud agar diisi secara lengkap paling lambat pada hari Kamis, tanggal **17 April 2025**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 19600212 198703 2 002



Publikasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PEKAN SURVEI (PERIODE 08 S.D. 25 APRIL TAHUN 2025)**

NILAI IPAK

3,92

NILAI INTERVAL KONVERSI

98,00

RESPONDEN

Jumlah : 76 orang

Jenis Kelamin : L: 55/P: 21

Pendidikan

Strata-3 : 2 orang

Strata-2 : 31 orang

Diploma IV/Strata-1 : 40 orang

Akademi/ Diploma : 1 orang

SLTA/SMA/Sederajat : 2 orang

Periode Survei 08 s.d. 25 April 2025

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PEKAN SURVEI (PERIODE 08 S.D. 25 APRIL TAHUN 2025)**

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR

NO	RUANG LINGKUP/INDIKATOR	NILAI	MUTU PELAYANAN
1.	Diskriminasi Pelayanan	3,89	Bersih dari Korupsi
2.	Pelayanan di Luar Prosedur	3,92	Bersih dari Korupsi
3.	Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku	3,92	Bersih dari Korupsi
4.	Pungutan Liar	3,92	Bersih dari Korupsi
5.	Percaloan/ Perantara	3,95	Bersih dari Korupsi

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA